

**KEBERADAAN ORGANISASI BOJONEGORO KAMPUNG
PESILAT (BKP) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SITUASI
YANG KONDUSIF
(Studi Kasus di Polres Bojonegoro)**

Bayu Iqbal Pamungkas¹, Andrianto Prabowo²
Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro
Email: Andri.bjn@gmail.com

ABSTRAK

Pencak silat merupakan suatu metode bela diri untuk melindungi diri dari ancaman bahaya serta bertahan hidup, mulai saat itu pencak banyak digunakan oleh kalangan kerajaan untuk mempertahankan dan memperluas pengajaran pencak silat. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimanakah keberadaan organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dalam rangka mewujudkan situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Bojonegoro? 2) Bagaimanakah peran organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dalam rangka mewujudkan situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Bojonegoro? Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris atau penelitian hukum sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan (Field research) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya pada masyarakat. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Keberadaan organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) sangat jelas diajarkan dalam menjaga dan menumbuhkan persaudaraan (*ukhwah wathaniyah*). Upaya yang dilakukan yaitu pembinaan karakter tanggung jawab sehingga dapat meningkatkan pemahaman lebih mendalam kepada pemuda terhadap tanggung jawab dirinya sendiri, orang tua, guru dan orang lain. Bukti dari pembinaan tanggung jawab sendiri yaitu, organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) tidak memberi dispensasi terhadap siswa jika rasa tanggung jawab itu dilalaikan maka organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) akan mengeluarkan siswa tersebut. Peranan organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dalam mewujudkan situasi yang kondusif dengan menumbuhkan sikap toleransi yang secara aktif ikut terlibat untuk saling mengulurkan tangan dalam menciptakan perdamaian. Dengan demikian didikan yang ada dalam organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dapat dibuktikan melalui hasil dari ajaran sikap toleransi.

Kata Kunci: Organisasi; Kampung Pesilat; Situasi Kondusif; Peran.

ABSTRACT

Pencak silat is a method of self-defense to protect oneself from threats of danger and survive, since then it has been widely used by royal circles to maintain and expand the teaching of martial arts. The problems discussed in this study are: 1) How is the existence of the Bojonegoro Pesilat Village (BKP) organization in order to create a conducive situation in the Bojonegoro Regency area? 2) What is the role of the Bojonegoro Pesilat Village (BKP) organization in creating a conducive

situation in the Bojonegoro Regency area? The type of research used is Juridical Empirical or Sociological legal research or referred to as field research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. Data analysis used is descriptive qualitative. The existence of the Bojonegoro Pesilat Village (BKP) organization clearly teaches how to maintain and foster brotherhood (*ukhwah wathaniyah*). Efforts are being made to develop the character of responsibility so as to increase youth's deeper understanding of their own responsibilities, parents, teachers and others. Evidence from fostering self-responsibility, namely, the Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) organization does not give dispensation to students. If this sense of responsibility is neglected, the Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) organization will expel these students. The role of the Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) organization in realizing the situation which is conducive to fostering an attitude of tolerance that is actively involved in intertwining hands with each other in creating peace. This is the training in the Bojonegoro Pesilat Village (BKP) organization can be proven through the results of the teachings of tolerance.

Keywords: Organization; Pesilat Village; Conducive Situation; Role.

PENDAHULUAN

Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat adalah merupakan salah satu dari organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan atas kesamaan kegiatan yaitu seni beladiri dan pencak silat, bahkan profesi bagi yang menekuninya. Pencak Silat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dipisah dalam pengertian dasar yaitu, pencak adalah permainan (keahlian) untuk mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, mengelak dan sebagainya, sedangkan silat adalah kepandaian berkelahi, seni bela diri khas Indonesia dengan ketangkasan membela diri dan menyerang untuk pertandingan atau perkelahian. Tokoh-tokoh IPSI beranggapan bahwa pencak dengan silat sama- sama mengandung pengertian kerohanian, irama, keindahan dan kiat maupun praktek, kinerja maupun aplikasinya. IPSI menjelaskan bahwa pencak silat adalah hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi (kemadiriannya), dan integritasnya (manunggal) terhadap lingkungan hidup/ alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Secara substansial, pelajaran pencak silat terdiri dari empat aspek yaitu: pertama aspek mental-Sepiritual, pencak silat lebih banyak menitik beratkan pada pembentukan sikap dan watak kepribadian pesilat yang sesuai dengan falsafah budi

pekerti luhur; kedua beladiri, pencak silat bertujuan untuk memperkuat naluri manusia untuk membela diri terhadap berbagai ancaman dan bahaya; ketigaseeni, pencak silat merupakan wujud kebudayaan dalam bentuk kaidah gerak dan irama taktik kepada keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antar wiraga, wirama, dan wirasa; keempat olah raga, dimana pencak silat sebagai olah raga ini menandakan bahwa pencak silat ini sudah bisa untuk dipertandingkan sebagai cabang keolahragaan.¹

Pencak Silat sebagai pendidikan jasmani mempunyai tujuan untuk mencapai kesehatan, tujuan rekreasi dan tujuan prestasi. Pada dasarnya tujuan adanya pencak silat dipergunakan sebagai alat untuk membela diri, memelihara kebugaran jasmani, mewujudkan rasa estetika, dan menyalurkan aspirasi sepiritual manusia. Dan juga pencak silat ini berfungsi membina manusia agar dapat menjadi warga teladan yang mematuhi norma-norma dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya para pendekar nampaknya lupa dengan hal tersebut. Mereka sering melakukan bentrokan antar perguruan pencak silat, entah dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Kekerasan perguruan silat merupakan kejahatan atau tindakan kriminal. Kejahatan atau tindakan kriminal adalah salah satu dari bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, hal ini dapat menimbulkan ketegangan individu atau ketegangan- ketegangan sosial, dan merupakan ancaman real atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan merupakan masalah kemanusiaan, yang juga merupakan masalah sosial.

Akhir-akhir ini tawuran antar perguruan silat sudah mulai mereda atau berkurang, berbeda dengan kondisi setahun atau dua tahun lalu yang angka tawuran antar perguruan silat masih tinggi. Banyaknya perbedaan dan perselisihan membuat suatu sengketa diantara kedua perguruan pencak silat PSHT dan PN pada khususnya di Kabupaten Bojonegoro yang membuat sering terjadinya bentrokan

¹ Suhadak, 2015, *Problematika Kaum Pesilat dan Perubahan Sosial*, Gramedia, Jakarta; hal 156

antar kedua perguruan pencak silat tersebut tidak kunjung selesai. Tentu ada kerugian yang terjadi dalam sengketa ini utamanya pada kenyamanan masyarakat sekitar yang tidak terlibat dalam sengketa kedua pihak terkait. Masyarakat sekitar yang merasa tidak nyaman karena adanya bentrokan yang terjadi antar kedua perguruan pencak silat, masyarakat merasa khawatir apalagi yang memiliki anak yang berusia remaja, para orang tua pasti sangat khawatir apabila anaknya ikut dalam bentrokan tersebut. Selain dari rasa ketidaknyamanan masyarakat ada akibat kerugian yang lainnya adalah kerusakan fasilitas umum serta yang lebih parah yaitu adanya korban jiwa yang sampai meninggal dari kedua belah pihak perguruan pencak silat antara PSHT dan PN didalam sengketa yang sering terjadi di antara kedua belah pihak tersebut. Guna mencegah terjadinya konflik sosial dan untuk menciptakan situasi Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polres Bojonegoro yang tergabung dalam komunitas Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP). Dimana BKP merupakan wadah bagi seluruh perguruan silat yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki tujuan yakni bersama-sama menjaga Kamtibmas yang aman, tentram, dan kondusif. Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan peneltiann yang berjudul “KEBERADAAN ORGANISASI BOJONEGORO KAMPUNG PESILAT (BKP) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SITUASI YANG KONDUSIF” (Studi Kasus di Polres Bojonegoro). Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan mengemukakan beberapa rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimanakah keberadaan organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dalam rangka mewujudkan situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Bojonegoro? 2. Bagaimanakah peran organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dalam rangka mewujudkan situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Bojonegoro?

METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto pendapat bahwa penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang

mana bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris, dengan kata lain penelitian hukum sosiologis dan atau disebut dengan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat.³ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang pemberlakuan atau implementasi hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris disebut sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau kejadian nyata yang terjadi di masyarakat agar dapat menemukan fakta-fakta.⁴

Penelitian ini dimulai dengan meneliti dan mencermati data sekunder dan akan ditindaklanjuti dengan pendekatan empirik melalui pengambilan data primer di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian empiris, peneliti berusaha menjelaskan makna dari hasil observasi dan wawancara secara mendalam untuk memperoleh data yang di perlukan peneliti sesuai dengan tema atau topik penelitian. Objek yang dibutuhkan peneliti yaitu pengurus dari organisasi perguruan pencak silat yang bersengketa dan anggota dari kedua perguruan pencak silat yang pernah melakukan sengketa, dan pihak yang pernah menyelesaikan sengketa antar kedua perguruan pencak silat. Serta cara penyelesaian sengketa yang sering terjadi akan diteliti lebih langsung pada observasi penelitian. Lokasi penelitian diambil pada keberadaan organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dalam rangka mewujudkan situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Adapun lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan

² Soerjono Soekanto, 2016, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal. 43.

³ Suharsimi arikunto, 2012, Prosedur suatu pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, hal.126

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta; hal 55

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap yakni tentang bentuk pembinaan narapidana terorisme yang dapat mewujudkan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dalam Rangka Mewujudkan Situasi yang Kondusif di wilayah Kabupaten Bojonegoro

Pencak silat merupakan salah satu budaya asli Indonesia yang dalam perkembangannya memiliki keragaman yang sangat khas di setiap wilayah maupun setiap provinsi. Dalam perjalanannya perkembangan pencak silat di Provinsi Jawa Timur memiliki sejarah yang panjang, mulai dari masa kerajaan hingga sekarang. Perkembangan pencak silat di Jawa Timur tidak hanya sekedar pencak silat dari sisi olahraga, akan tetapi dari sisi-sisi lainnya.

Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang lekat dengan pencak silat yaitu Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Timur merupakan daerah pelestari budaya tradisional yaitu pencak silat. Sejarah berkembangnya seni bela diri pencak silat di Kabupaten Bojonegoro dimulai sejak 1900an dan masih terjaga kelestariannya hingga sekarang. Daerah tersebut menjadi salah satu basis perkembangan seni bela diri pencak silat di Indonesia.

Bentuk-bentuk pelestarian itu seperti adanya berbagai jenis aliran perguruan pencak silat. Keberadaannya pun sangat beragam dengan ciri khas dan keunikan dari masing-masing perguruan. Lahirnya pencak silat di Kabupaten Bojonegoro sangat erat dipengaruhi ajaran perguruan pencak silat dengan basis ilmu Setia Hati yang pertama kali dicetuskan oleh Ki Ngabei Soerodiwiryo. Selain banyaknya perguruan pencak silat, Kabupaten Bojonegoro juga terkenal sebagai pusat dari beberapa perguruan pencak silat. Setidaknya ada delapan perguruan yang berpusat di Kabupaten Bojonegoro sehingga banyak berdiri padepokan-padepokan perguruan pencak silat besar yang dibangun seperti Padepokan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Padepokan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI), dan sebagainya.

Adanya padepokanpadepokan besar yang berdiri di Kabupaten Bojonegoro membuat adanya peningkatan kunjungan dari orang luar daerah untuk mendatangi Kabupaten Bojonegoro setiap tahunnya khususnya bagi para pesilat. Sehingga diharapkan dapat menciptakan sebuah wisata budaya baru yang dapat mendongkrak pendapatan daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan perhatian lebih terhadap budaya dan kearifan lokal sebagai ciri khas daerah dan juga menjadi pembeda dengan daerah lain. Kearifan lokal budaya pencak silat mempunyai sejarah panjang dan sudah melekat di masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Berangkat dari pemikiran tersebut, bupati dan wakil bupati Kabupaten Bojonegoro memiliki ide mengangkat pencak silat menjadi ikon daerah. Pemikiran tersebut dibahas dengan para pihak terkait dan juga para *stakeholder* pencak silat di Kabupaten Bojonegoro dan mendapat respon yang baik.

Dalam pembahasan tersebut juga muncul rumusan-rumusan kebijakan yang kedepan akan menjadi peraturan bupati dan diimplementasikan dalam berbagai program kerja. Dengan banyaknya perguruan pencak silat di Kabupaten Bojonegoro, situasi yang kondusif ini bisa dapat didukung khususnya para pesilat dan semua lapisan masyarakat. Dengan berjalannya waktu diharapkan situasi yang kondusif tersebut dapat menjadi sebuah ciri khas bagi Kabupaten Bojonegoro dan diharapkan meningkatkan pemberdayaan yang dinilai sama dengan visi misi Kabupaten Bojonegoro juga. Hal tersebut dikarenakan beberapa perguruan silat yang dinaungi oleh IPSI banyak terlahir di Bojonegoro dan ini merupakan sesuatu yang baik untuk diperdayakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara rutin mengadakan pertemuan dengan para stakeholder terkait pengembangan kondisi yang kondusif guna memberikan wadah dan sarana sebagai tempat menyampaikan aspirasi dan gagasannya. Pertemuan ini bertujuan untuk memunculkan perencanaan dan kegiatan-kegiatan terkait dengan implementasi dalam mengembangkan situasi yang kondusif tersebut. Sehingga anggapan negatif masyarakat tentang pencak silat di Kabupaten Bojonegoro akan hilang dan tujuan dari city situasi yang kondusif ini bisa tercapai.

Hadirnya Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) sebagai wadah semua Perguruan Pencak Silat, justru terus berupaya menciptakan kondusifitas, membantu

masyarakat dan kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dari tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga desa dengan berbagai kegiatan mulai sosialisasi keamanan hingga patroli bersama. Penekanan ini dilakukan melalui patroli bersama jajaran Polsek menjelang Hari Besar, juga kegiatan rutin untuk pembahasan situasi Kamtibmas di wilayah masing-masing.

Menurut Wahyu Subakdiono, hadirnya BKP telah memberikan dampak positif kebersamaan dan kerukunan anggota Pencak Silat dengan slogan “Damai Bersaudara” ini. Hal ini sangat terlihat dalam beberapa tahun terakhir, angka gesekan antar oknum anggota pencak silat yang rendah dan terus menurun di Bojonegoro. Belum pernah ada gesekan antar warga dengan jumlah massa banyak (tawuran atau pertikaian) yang melibatkan anggota pencak silat. Namun karena banyaknya masyarakat yang menjadi warga sebuah Perguruan Pencak Silat, sehingga ketika terjadi gesekan dibawah sering dianggap pertikaian antar perguruan.

Pembinaan yang dilakukan BKP di tingkat kecamatan diyakini banyak pihak sangat berarti dan menekan angka gesekan atau kesalahpahaman antar anggota pencak silat. Jika dikatakan angka pertikaian tinggi di Bojonegoro harus dilihat dengan cermat, BKP didirikan untuk menciptakan persaudaraan antar organisasi pencak silat agar guyub dan rukun serta membantu Kepolisian dalam menciptakan Kamtibmas di Bojonegoro. Langkah-langkah pencegahan selama bertahun-tahun telah bisa dirasakan, dibanding sebelum berdirinya BKP, bahkan bisa dibandingkan dengan kabupaten lain. Tidak hanya kriminalitas, namun dari segi sosial serta pendidikan juga perlu diawasi. Termasuk mengawasi dana desa dana bisa terserap dengan baik. Peran seluruh lapisan masyarakat ikut sama-sama memacu dan mendorong kepala desa menyerap dana desa dengan tepat, agar pembangunan tidak terhambat. Apabila ada yang kurang jelas, lanjut dia, sebagai anggota Polri, polda, dan polres siap menjadi konsultan manakala ragu-ragu menggunakan dana desa tersebut.

Selain itu terdapat isi Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani oleh 20 perguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Bojonegoro, yang tergabung dalam Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP):

1. Dalam menyikapi situasi yang berkembang saat ini, seluruh perguruan silat yang tergabung dalam Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. Sepakat bahwa keberadaan komunitas yang berafiliasi dengan perguruan silat adalah ilegal dan setiap perguruan silat bertanggung jawab atas ajaran yang mulia;
3. Induk perguruan silat tidak pernah mengakui adanya komunitas, karena tidak diatur dalam AD/ART Organisasi perguruan pencak silat;
4. Segala bentuk tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh
5. komunitas, menjadi tanggung jawab masing - masing dan bukan menjadi tanggung jawab perguruan pencak silat;
6. Seluruh anggota perguruan pencak silat dilarang menggunakan atribut (kaus, stiker, topi, bendera) baik berupa logo,gambar maupun tulisan identitas perguruan selain latihan dan kegiatan perguruan pencak silat;
7. Selama masa pandemi COVID-19 sampai situasi kamtibmas kondusif untuk latihan hanya diperbolehkan pagi (pukul 06:00 wib) sampai sore hari (pukul 17:00 wib);
8. Pihak kepolisian bersama dengan ketua BKP dan ketua ranting perguruan pencak silat melaksanakan patroli untuk merazia atribut (kaus, stiker, topi, bendera) guna menciptakan kamtibmas yang aman damai dan kondusif;
9. Anggota perguruan yang ditemukan menggunakan atribut (kaus, stiker, topi, bendera) baik berupa logo,gambar maupun tulisan identitas perguruan selain latihan dan kegiatan perguruan pencak silat bersama dengan BKP dan ketua ranting akan diserahkan pihak kepolisian untuk dilaksanakan pembinaan;
10. Apabila ada anggota perguruan pencak silat yang melanggar kesepakatan maka pengurus perguruan pencak silat tingkat desa sampai tingkat kabupaten turut bertanggung jawab sesuai aturan hukum yang berlaku.

Peran organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dalam rangka mewujudkan situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Di organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) sangatlah jelas dalam mewujudkan situasi yang kondusif, dalam lingkup latihan pun semua siswa yang mengikuti latihan harus menghormati adanya perbedaan dalam suku, ras, agama. Di sisi lain dari lingkup latihan ketika pada jam latihan di mulai pada pukul 20:00 WIB yang mana hal tersebut untuk menghormati kepada siswa yang ada kegiatan mengaji. Di sisi lain di organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) khususnya ranting ranting dalam setiap tahun ada dari berbagai agama dan suku.

Tetapi dalam perbedaan tersebut tidak mempersulit kami untuk mengajarkan ajaran organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) karena dalam organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) tersebut sangat selaras bahwa adanya rasa toleransi tidak memandang suku, ras, agama maupun kedudukan. Semua yang ada di dalam organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) itu adalah saudara, karena di organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) adalah organisasi yang mengedepankan rasa persaudaraan. dalam organisasi di organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) sangatlah jelas dalam mewujudkan situasi yang kondusif, dalam lingkup latihan pun semua siswa yang mengikuti latihan harus menghormati adanya perbedaan dalam suku, ras, agama. Sehingga disini akan terbentuk rasa toleransi antar sesama karena organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) disini mengedepankan rasa Solidaritas atau persaudaraan.

Sebagai pelatih mengamalkan dan mengajarkan apa yang ada di dalam organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) yaitu salah satunya saling menghormati dari semua perbedaan yang ada di dalam organisasi organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP), dari itu semua agar tidak ada kesenjangan antara perbedaan satu sama yang lain. Disisi lain banyak sikap toleransi yang kami ajarkan kepada siswa contohnya, jika siswa bertemu dengan sesama saudara atau pelatih ketika di luar jam latihan maka harus bersalaman atau bersapa, selanjutnya jika ada perbedaan dari sebuah bahasa yang di anjurkan kepada siswa agar berkomunikasi dengan bahasa indonesia, selanjutnya dari sikap toleransi yaitu ketika pada jam latihan tidak mewajibkan siswa perempuan untuk memakai jilbab karena ada yang lain agama yang terakhir yaitu ketika siswa sebelum latihan dan

sebelum pulang siswa wajib berdo'a, dari berdo'a tersebut di anjurkan untuk berdo'a menurut keyakinan diri sendiri.

Dalam organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP), Kami sebagai pelatih mengamalkan dan mengajarkan apa yang ada di dalamnya yaitu salah satunya saling menghormati dari semua perbedaan yang ada di dalam organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dari itu semua agar tidak ada kesenjangan antara perbedaan satu sama yang lain. Sehingga akan tercipta rasa persaudaraan dan kerukunan di dalam organisasi tersebut. Tidak lupa pula diajarkan untuk saling menghormati kepada sesama saudara organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dan yang lainnya hal itu untuk menjalin rasa kekeluarga yang erat. Hal lainnya juga di organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) di ajarkan jika ada saudara organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) ada yang mempunyai musibah keluarganya meninggal ikut serta takziah dan tahlil di rumah yang mendapat musibah. Dan selanjutnya jika ada acara perayaan keagamaan seperti idul fitri, Natal dan lain - lain ikut serta untuk menjadi panitia dari segi keamanan parkir dan lain-lain.

Dapat di tarik kesimpulan bahwa di dalam ajaran organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) sangat jelas untuk mewujudkan situasi yang kondusif. Semua itu tidak luput dari peran seorang pelatih, siswa dan anggota organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) pada umumnya untuk menjaga dan mengamalkan rasa toleransi dari ajaran organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP). Dalam hal tersebut untuk meningkatkan rasa persaudaraan antar umat dan bangsa dalam menjaga satu kesatuan bangsa. Dalam ajaran organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) sangatlah di terima oleh masyarakat di karenakan ajaran organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) sangat menguntungkan kepada masyarakat untuk menjaga keutuhan dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas, sesuai kajian teori yang mana tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujud kesadaran akan kewajibannya. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Disebut demikian karena manusia, selain merupakan makhluk

individual dan makhluk sosial, juga merupakan makhluk Tuhan. Manusia memiliki tuntutan yang besar untuk bertanggung jawab mengingat ia mementaskan sejumlah peranan dalam konteks sosial, individual ataupun teologis.

Selanjutnya bahwa pembinaan tanggung jawab di organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) tersebut sangatlah jelas karena dari semua ajaran tanggung jawab sudah di ajarkan dan di lakukan oleh anggota organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP). Melalui pembinaan hal tersebut tidak bisa dilakukan jika dari anggota, pelatih dan siswa tersebut tidak memiliki kesadaran tentang penanaman rasa tanggung jawab tersebut. Dalam organisasi pencak silat dimanapun biasanya yang di utamakan adalah dari segi kekuatan, prestasi dan hal lainnya yang mengenai dari pencak silat tersebut. Tetapi di organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) sendiri ada penanaman sebuah karakter yaitu tanggung jawab, dari pengajaran dan penanaman rasa tanggung jawab itu sangatlah jelas adanya, contohnya yang pertama ketika seseorang mau mengikuti latihan di organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) tersebut wajib dan tidak bisa di tolak yaitu harus beretika dan mempunyai sopan santun kepada guru, orang tua dan orang lain. Terus kemudian yang kedua ketika di organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) harus bisa menghentikan sesuatu perilaku yang buruk sebelum mengikuti latihan organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) contohnya mabuk – mabukan, judi, narkoba. Selanjutnya melalui tanggung jawab tersebut para pemuda bisa mengurangi sifat kemalasannya, sering nongkrong di pinggir jalan, suka balapan.

Melalui pembinaan tanggung jawab tersebut banyak anggota PSHT yang awalnya tidak memiliki rasa tanggung jawab pada akhirnya sadar atas hal tersebut. Untuk mewujudkan situasi yang kondusif berarti bukan hanya menerima kehadiran orang lain yang berbeda status, keyakinan,serta perbedaan lainnya, tetapi secara aktif ikut terlibat untuk saling mengulurkan tangan dalam menciptakan perdamaian. Di dalam ajaran organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) sikap toleransi sangat di tekankan kepada anggota maupun siswa. Adapun sikap toleransi tersebut dapat di terima oleh masyarakat sekitar sehingga organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) di ranting dan cabang bisa berkembang dengan pesat. Sikap

mewujudkan situasi yang kondusif yang telah ada di ajaran organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) tersebut memenuhi respon positif terhadap anggota maupun siswa. Contohnya ketika siswa atau anggota bertemu dengan sesama anggota maka di anjurkan untuk bersalaman, tidak membedakan suatu jabatan, sosial dan ekonomi, jika dari salah satu anggota mempunyai sebuah musibah seperti meninggal maka untuk semua anggota dianjurkan untuk berziarah atau takziah dan banyak hal lain yang mengenai dengan rasa toleransi, ikut serta dalam perayaan hari raya agama, mengikuti acara adat daerah, saling menghormati satu sama lain untuk mewujudkan perdamaian bagi anggota organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) masyarakat sekitar pada umumnya.

Dibentuknya kampung pesilat itu dalam rangka implementasi Program Kapolri yaitu Promoter, Penguatan harkamtibmas dan membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap keamanan masyarakat, selain itu juga untuk membuat rukun antar perguruan silat yang dulu sempat diisukan sering terjadi perkelahian antar kelompok perguruan. Dibentuknya Bojonegoro Kampung Pesilat dengan maksud untuk menggandeng seluruh kelompok perguruan pencak silat yang ada di Bojonegoro, ada sebanyak 13 perguruan pencak silat yang tergabung dalam IPSI, mereka akan kita berdayakan sebagai Mitra Kamtibmas untuk bisa membantu tugas Polisi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar selalu aman.

KESIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian penyajian data dan analisis data dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Keberadaan organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) sangatlah jelas diajarkan dalam menjaga dan menumbuhkan ukhwh wathaniya adalah persaudaraan sesama warga yang tinggal di wilayah yang sama. Upaya yang dilakukan dengan cara pembinaan karakter tanggung jawab yang dapat meningkatkan pemahaman lebih mendalam kepada pemuda terhadap tanggung jawab dirinya sendiri, orang tua, guru dan orang lain. Bukti dari pembinaan tanggung jawab sendiri yaitu, organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) tidak memberi dispensasi terhadap siswa jika rasa tanggung

jawab itu dilalakan maka organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) akan mengeluarkan siswa tersebut.

2. Peranan organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dalam mewujudkan situasi yang kondusif, adalah dengan tumbuhnya sikap toleransi yang berarti bukan hanya menerima kehadiran orang lain yang berbeda status, keyakinan, serta perbedaan lainnya, tetapi secara aktif ikut terlibat untuk saling mengulurkan tangan dalam menciptakan perdamaian. Upaya yang dilakukan oleh organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) yaitu dengan cara menumbuhkan rasa toleransi terhadap pemuda di organisasi Bojonegoro Kampung.
3. Pesilat (BKP) yang dimana sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat sekitar, dan dapat respon positif oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian didikan yang ada dalam organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dapat dibukti melalui hasil dari ajaran sikap toleransi antara lain seperti saling menghormati ketika ada perayaan hari raya idul fitri dan perayaan hari besar agama lain selain Islam, yang selanjutnya ketika bertemu dengan anggota maupun orang lain saling menyapa dan bersalaman, untuk anggota perempuan tidak diwajibkan untuk memakai jilbab ketika latihan berlangsung, menggunakan satu bahasa (bahasa Indonesia), berkunjung kepada sesama anggota yang tertimpa musibah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta; , 2014, hal 55
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. 2016. hal. 43.
- Suhadak. *Problematika Kaum Pesilat dan Perubahan Sosial*, Gramedia, Jakarta. 2015. hal 156
- Suharsimi arikunto. Prosedur suatu pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.126